

TAJUK RENCANA

Jangan Abai Soal Keterwakilan Perempuan

SEPEREMPAT abad sudah Indonesia berada dalam orde reformasi. Dalam perjalanan ini, dengan terbentur Indonesia sudah enam (6) kali melaksanakan pemilihan umum. Dengan perjalanan panjang ini, mestinya persoalan partisipasi perempuan dan kuota keterwakilan perempuan sudah selesai. Ironis, semua ternyata masih jauh dari harapan. Pengabaian kuota keterwakilan perempuan kini berdampak fatal.

Adalah Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) yang mengadakan seluruh Anggota KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Jumat (21/6) lalu. Dalam pengaduan itu KMPKP mendalilkan KPU RI mengabaikan sejumlah putusan pengadilan berkaitan peraturan 30% perempuan calon anggota legislatif pada Pemilu 2024. Pengabaian berdampak fatal karena menimbulkan sengketa Dapil VI untuk pemilihan anggota DPRD Gorontalo. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan PKS untuk menggelar pemilihan suara ulang (PSU). (KR, 22/6).

KMPKP juga menuntut penyelenggara dinyatakan melanggar kode etik. Mereka menuntut Ketua KPU, Hasyim Asy'ari bersama dengan Ketua Divisi Teknis Idham Kholik dan Divisi Bidang Hukum Mochamad Affuddin dijatuhi sanksi maksimal yaitu diberhentikan sebagai anggota KPU. Koalisi juga meminta anggota yang lain diberi peringatan yang keras. KMPKP menyebut apa yang dilakukan KPU merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. Lantaran, ketentuan itu tercantum dalam Pasal 245 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Koalisi menilai apa yang dilakukan KPU merupakan hal parah lantaran pengabaian dilakukan secara terang-terangan. Mereka melanggar perintah hukum Putusan Mahkamah Agung No 24 P/HUM/2023 dan Putusan Bawaslu No 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023.

Upaya mewujudkan pemilu yang konstitusional, berintegritas, serta adil dan setara jender, terus dilantangkan. Ada tujuan jangka panjang ketika aduan dan tuntutan ini dilaksanakan. Koalisi meminta DKPP memutus pengaduan sebagai perkara prioritas

agar Pilkada Serentak Nasional 2024 dapat diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang tidak bermasalah secara etik dan hukum.

Keterwakilan perempuan, bukanlah hal sederhana apalagi *receh*. Keterwakilan perempuan dalam komposisi anggota DPR menjadi hal yang penting. Kehadiran perempuan di ranah parlemen akan membuat susunan anggota legislatif tanah air menjadi lebih proporsional dan inklusif. Sayangnya seperti diakui Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, komitmen parpol belum sepenuhnya melembaga dalam mendorong internalisasi keterwakilan perempuan. Bahkan partai masih menempatkan keterwakilan perempuan sekedar memenuhi persyaratan formalitas.

Bisa dikatakan kuota keterwakilan perempuan belum menjadi paradigma yang melekat dalam tatakelola pemilu dan demokrasi yang inklusif. Menjadi tidak heran berdasar Global Gender Gap Report yang dirilis World Economic Forum (Maret 2021), posisi Indonesia dalam bidang politik masih diurutan ke-92 dunia dengan skor 0,164. Potret ini menunjukkan masih terdapat problem serius dalam praktik elektoral di Indonesia.

Miris. Kredo *demokrasi tanpa perempuan adalah nol* justru acap dianggap kecegan perempuan meminta jatah kursi. Bahkan tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan khususnya di lembaga legislatif, dianggap bukanlah persoalan seperti stunting, pernikahan dini, angka kematian ibu (AKI) melahirkan yang tinggi, kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual, diskriminasi upah dan lainnya dianggap hanya persoalan perempuan (dan keluarga). Bangsa ini mestinya sadar, persoalan yang sangat merugikan perempuan ini bukan hanya persoalan perempuan. Ini persoalan bangsa.

Sejumlah bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas hidup perempuan bertalian erat dengan tingkat kemajuan suatu bangsa. Dan ada harapan, hadirnya perempuan politisi akan memengaruhi pengambilan kebijakan untuk lebih ramah perempuan. Mengingat problema yang merugikan perempuan ini adalah persoalan serius bangsa menuju Indonesia Emas 2045. □f

JURNALISME PETUGAS HAJI:

Pilar Informasi dan Kemanusiaan di Tanah Suci

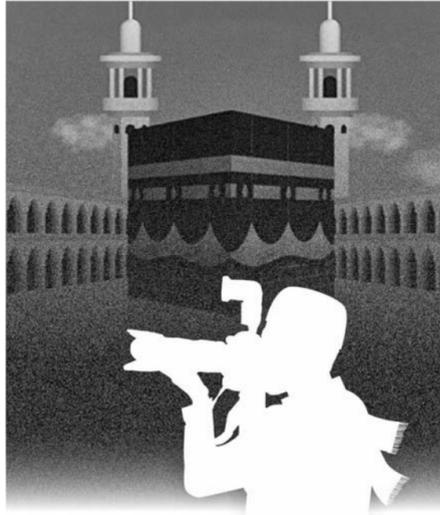
Primaswolo Sudjono

PELAKSANAAN ibadah haji bagi Indonesia bukan hanya sekadar rutinitas tahunan. Ini adalah pekerjaan besar yang melibatkan lebih dari 241 ribu jemaah, mencerminkan kebangsaan dan harga diri di mata dunia Islam. Dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar dalam mengelola prosesi yang panjang dan kompleks ini.

Selain mengelola jumlah jemaah yang sangat besar, banyaknya tantangan dalam pelaksanaan ibadah haji memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Kesuksesan pelayanan pada jemaah haji tidak bisa hanya bertumpu pada Kementerian Agama (Kemenag), melainkan juga membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya manusia pendukung, salah satunya adalah media massa melalui para jurnalis.

Hadirnya jurnalis dari berbagai media massa menjadi bagian penting dalam pelayanan haji. Tergabung dalam Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, berperan sebagai penghubung informasi antara jemaah, keluarga di rumah, pemerintah, dan masyarakat luas. Informasi terkait perkembangan haji sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah ini.

Sebagai petugas haji, jurnalis memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi langsung terkait kegiatan para jemaah haji, likaliku pelaksanaan haji, dan kondisi di lapangan. Jurnalis bisa mengetahui langsung hati dan perasaan para jemaah yang sedang berhaji, yang seringkali telah menunggu bertahun-tahun untuk bisa melaksanakan ibadah ini. Cerita romantis pasang-an suami istri, perjuangan menabung bersama, hingga bisa berangkat menjadi tamu Allah, menjadi warna-warni yang bisa diungkap oleh jurnalis.



KR-JOKO SANTOSO

Sesuai dengan UU Pers No. 40/1999, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi. Jurnalis petugas haji harus tetap menjaga sikap kritis ketika saat terjun ke lapangan dan menemui para narasumber.

Sikap kritis melalui masukan yang diberikan dibutuhkan untuk perbaikan

layanan haji. Sebagai petugas haji maka diuntungkan, karena nara sumber atau pun pemangku kepentingan dalam wadah yang sama, sehingga konfirmasi atau pun responsnya lebih cepat. Dengan demikian, terhindar dari kegaduhan informasi.

Kedekatan dengan fakta dan narasumber, jurnalis melalui media masanya, menjadi garda terdepan dalam menghadapi sebaran hoax, atau pun isu-isu negatif yang sengaja *diframing* pihak tertentu, sehingga masyarakat terbantu mendapat edukasi yang benar terkait pelaksanaan dan layanan haji.

Tantangan dan Solusi

Dengan durasi waktu pelaksanaan 46 hari, maka jurnalis petugas haji memiliki tantangan yang tidak ringan. Jauh melebihi liputan Piala Dunia yang lamanya sekitar sebulan. Menjalankan peran yang tidak mudah. Selain harus bekerja dalam tekanan waktu dan kondisi lapangan yang seringkali menantang, termasuk temperature udara yang tinggi.

Dengan tantangan tersebut, harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan cepat, akurat, dan tidak menimbulkan kepanikan atau kesalahpahaman. Bekal wawasan yang ditambahkan dalam pelatihan sebelum diberangkatkan, dirasa menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi lapangan.

Penguatan diri dalam *skills* dalam menghadapi tantangan ini, pelatihan yang memadai dan dukungan dari penyelenggara haji sangat penting, sehingga peran yang bermanfaat bisa lebih banyak terwujud. □f

H Primaswolo Sudjono,
Wartawan KR, Anggota Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi 2024,

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengis subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSoc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Waked. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklnkryk23@yahoo.com, iklnkryk13@gmail.com. **Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'...** Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) • Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Quo Vadis Implikasi Pajak Generasi Emas

Deranika Ratna Kristiana

HAK warga negara Indonesia salah satunya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang terjangkau bahkan "gratis tapi yang berkualitas". Lantas, dari mana uang untuk mewujudkan hak tersebut? Apakah dari pajak? Jika iya, apakah masyarakat ikhlas dan rela membayar pajak sesuai ketentuan? Apakah masyarakat tidak khawatir pendapatan pajak akan disewewangkan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab? Apakah pajak tidak memberatkan? Apakah lebih baik uang disedekahkan daripada untuk bayar pajak? Bagaimana agar masyarakat dengan rela dan ikhlas untuk membayar pajak yang sesuai?

Transparansi dan akuntabilitas fiskus harus diterapkan untuk menumbuhkan kesadaran dan membangun kepercayaan masyarakat. Keberadaan Ombudsman menjadi faktor kunci yang mempercepat masyarakat dengan pemerintah dalam pelayanan publik, termasuk perpajakan. Peran Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) juga sangat krusial untuk lebih meningkatkan kepatuhan pajak dan melindungi hak masyarakat (wajib pajak) guna memperkuat demokrasi perpajakan di Indonesia.

Mindset masyarakat, jika ingin visi misi generasi emas tercapai adalah menganggap pajak sebagai investasi di masa yang akan datang yang tumbuh sepenuhnya di era digitalisasi dengan keterampilan teknologi yang canggih, transformasi instan dalam cara belajar, dan beradaptasi secara eksponensial. Generasi emas mengacu pada generasi alpha dan generasi zoomer yang mencapai puncak produktivitas sekitar tahun 2045. Generasi emas menjadi agen perubahan yang kreatif, inovatif, interaktif, dan intuitif. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan menjadi tolok ukur kesuksesan investasi untuk membangun generasi ideal yang berdaya saing global dan internasional, serta bermoral.

Tujuan utama generasi emas pada sektor ekonomi adalah mendorong transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau. Pemanfaatan teknologi

digital pada bisnis digital seperti *fin-tech* dan *e-commerce* dengan mengembangkan bisnis yang ramah lingkungan serta berkelanjutan akan mudah ditransformasikan oleh generasi muda demi peningkatan produktivitas sektor ekonomi dan meningkatkan ketahanan ekonomi sehingga membuka banyak peluang lapangan pekerjaan bagi anak muda yang mau berinovasi serta meningkatkan pendapatan masyarakat dengan harapan akan sadar pajak.

Kontribusi pajak dalam APBN pada tahun 2023 mencapai 72,28% setara Rp 1.921,7 triliun dari total APBN yaitu Rp 2.652,3 triliun. Tertuang dalam APBN tahun 2023 bahwa Rp 612,2 triliun dialokasikan untuk sektor pendidikan, baik pendidikan formal, non formal, ataupun vokasi yang pada tahun 2024 ditingkatkan menjadi Rp 660,8 triliun atau setara dengan 20% dari total APBN. Anggaran kesehatan yang dialokasikan dari pendapatan pajak pada tahun 2023 sebesar 5,2% dari total APBN atau setara Rp 172,5 triliun dan pada tahun 2024 anggaran meningkat menjadi 5,6% setara Rp 186,4 triliun. Untuk mewujudkan visi misi generasi emas, pemerintah diharapkan berkomitmen untuk konsisten meningkatkan alokasi pendapatan pajak yang adil serta memastikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat baik di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pajak berperan dalam membiayai pendidikan yang berkualitas, seperti memberi beasiswa pendidikan bagi anak muda yang berprestasi, gaji guru, membangun dan memperbaiki infrastruktur sekolah. Pajak juga berperan penting dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dengan harga terjangkau, seperti penyediaan Puskesmas, rumah sakit

daerah, dan program kesehatan JKN-KIS, gaji tenaga kesehatan, infrastruktur kesehatan, imunisasi, edukasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan dalam meningkatkan kualitas obat-obatan. Apakah kita bisa ikut andil membantu anak muda Indonesia dalam meraih cita-cita dan mendapatkan hak pendidikan tapi terbatas biaya? Apakah kita bisa ikut andil dalam penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan demi memenuhi hak masyarakat yang kurang mampu? SANGAT BISA!

Jadikan pajak sebagai investasi di masa depan yang mempunyai asas timbal balik. Masyarakat visioner, akan rela membayar pajak yang sesuai dan mendapatkan kontraprestasi meskipun tidak langsung, serta dapat membantu masyarakat yang berkecukupan rendah dalam hal pendidikan, menjadikan generasi emas meraih cita-cita dengan fasilitas pendidikan yang berkualitas, dan mewujudkan layanan kesehatan yang memuaskan bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu mari tunaikan kewajiban dan tunutlah hak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Generasi emas, Pajak Kuat Indonesia Maju. □f

Deranika Ratna Kristiana,
dosen STIE YKPN.

Pojok KR

- 14 Asrama haji siap layani pu-langnya jemaah
- Siap tidak siap, harus siap!
- ***
- Pemeriksaan kesehatan perempuan penghibur di Banyumas
- Semoga semua sehat
- ***
- Keseragaman pemikirkan memis-kinkan kemanusiaan
- Perbedaan itu 'sunatullah'

Berabe